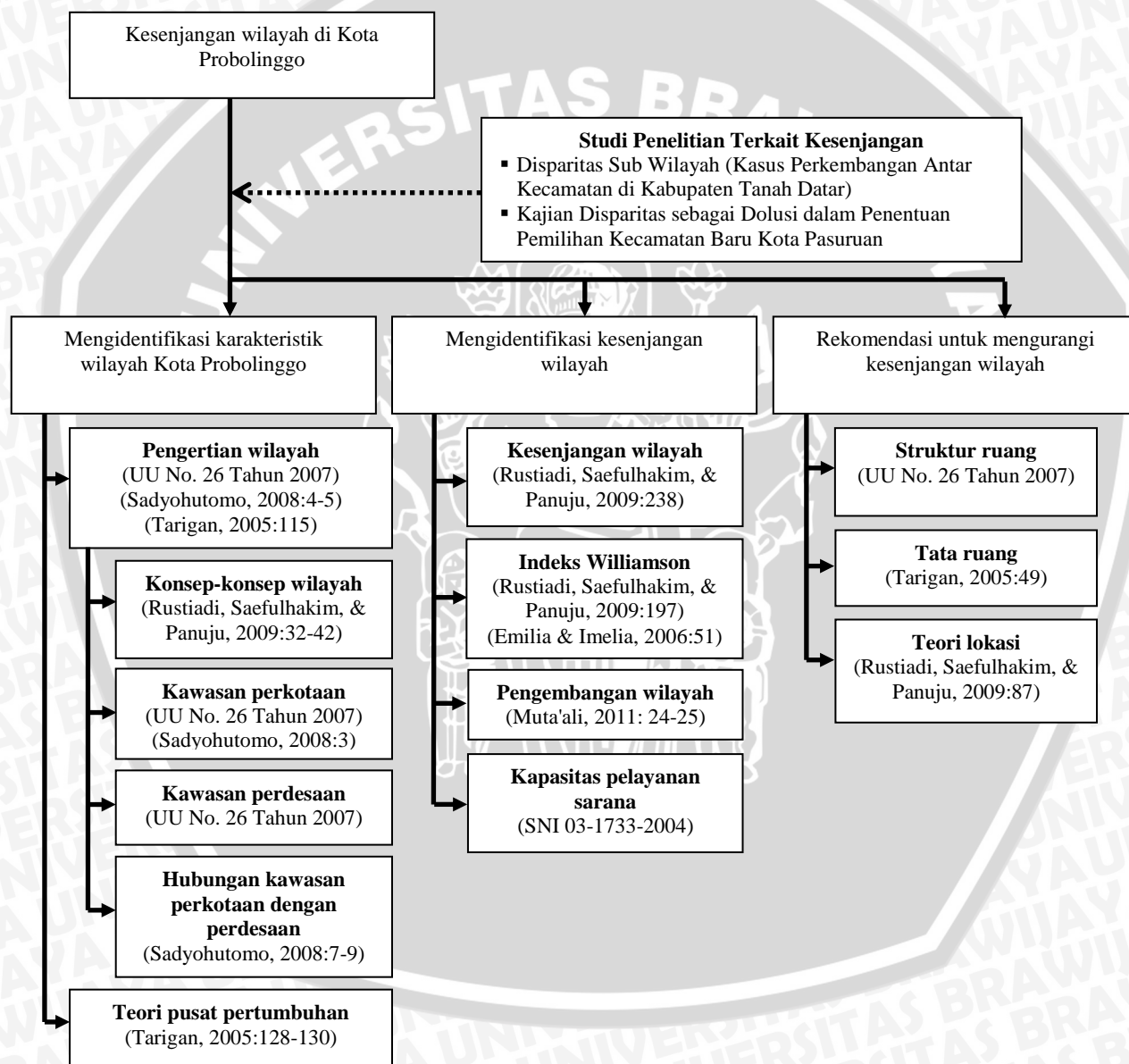


BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kerangka teori ditujukan dalam penentuan pustaka yang akan digunakan sebagai acuan maupun sumber informasi untuk penulisan penelitian Kajian Kesenjangan Wilayah Utara-Selatan di Kota Probolinggo.



Gambar 2. 1 Kerangka Teori

2.2 Pengertian Wilayah

Definisi wilayah menurut UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa batas suatu wilayah dapat menggunakan batas administratif yang ada. Suatu wilayah juga dapat menggunakan batas fungsional seperti wilayah pesisir yang di dalamnya terdapat kawasan lindung dan budidaya. Istilah wilayah digunakan untuk dua kondisi yang berbeda (Sadyohutomo, 2008:4-5) yaitu,

- a) Untuk menyatakan adanya kondisi geografis yang homogen. Penggunaan istilah wilayah ini sering berhubungan dengan proses evaluasi potensi suatu kota sebagai bahan perencanaan;
- b) Untuk menyatakan adanya kelompok fungsional. Dalam pengertian ini lebih menekankan pada adanya pusat kegiatan dan *hinterland*-nya serta digunakan untuk membedakan wilayah berdasarkan pergerakan penduduknya. Ada wilayah yang disebut penyerap (*demand*) dan penyedia (*supply*) manusia.

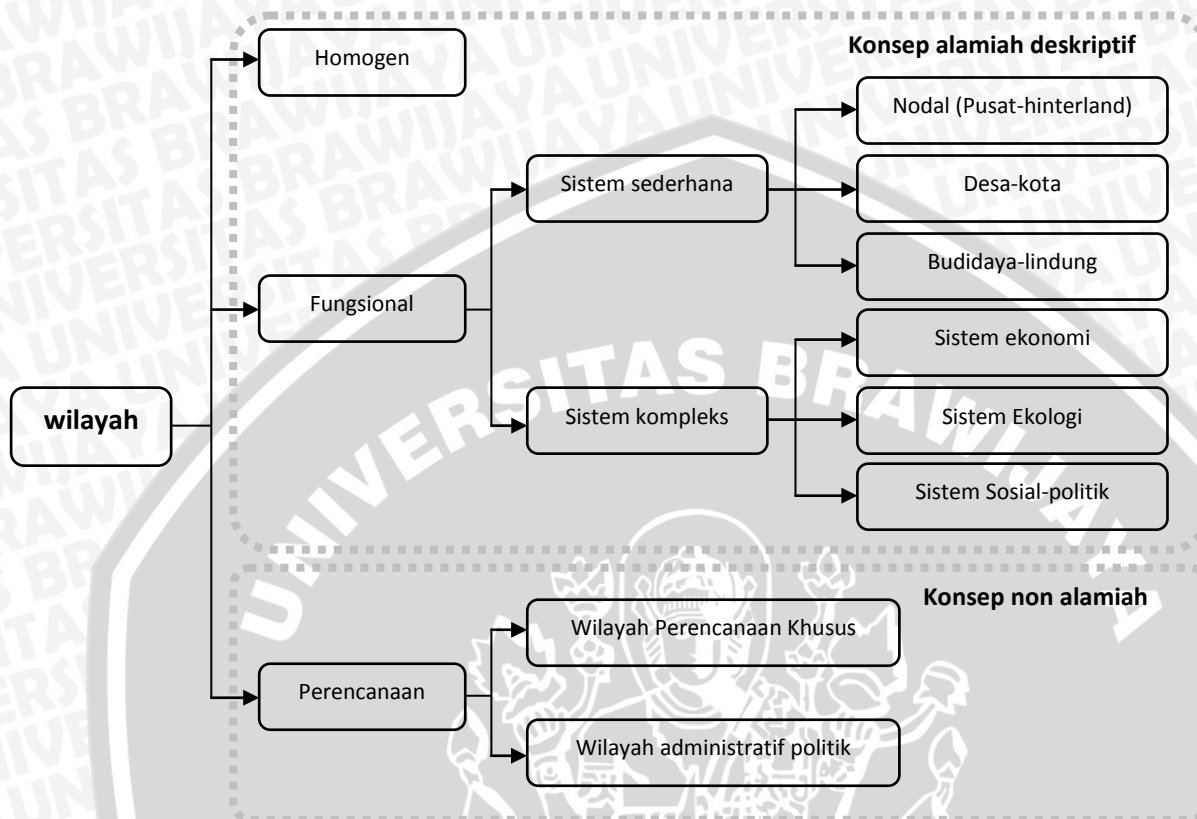
Menurut Isard dalam Rustiadi (2009:25) menganggap bahwa wilayah tidak hanya berupa ruang dengan batas-batas tertentu tetapi lebih menekankan pada ruang yang memiliki arti karena adanya masalah-masalah yang ada di dalamnya sehingga ahli regional memiliki ketertarikan dalam menangani permasalahan tersebut, khususnya yang menyangkut permasalahan sosial-ekonomi.

Adisasmita (2010) mendefinisikan wilayah sebagai ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau fungsional.

Tarigan (2005:115) mendefinisikan wilayah sebagai ruang pada permukaan bumi secara umum tanpa konotasi tentang isi, karakter, maupun kepentingan yang terkait dan dapat digunakan secara fleksibel dan mencakup penggunaan ruang secara umum.

Nugroho & Dahuri (2004:9) mengartikan wilayah (region) sebagai suatu area geografis yang memiliki tujuan analisis dan perencanaan tertentu serta merupakan media untuk berlokasi dan berinteraksi. Area geografis tidak dapat ditentukan batasannya karena disesuaikan dengan tujuan analisisnya.

Konsep wilayah yang dikenal selama ini adalah wilayah *homogen*, wilayah sistem/fungsional, dan wilayah perencanaan/pengelolaan (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009). Berikut ini adalah skema sistematika konsep wilayah,



Gambar 2. 2 Sistematika konsep-konsep wilayah
Sumber: (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009)

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa wilayah merupakan ruang yang memiliki batas administratif ataupun fungsional yang di dalamnya terdapat berbagai permasalahan untuk diselesaikan. Secara umum konsep wilayah dapat dibedakan menjadi tiga yaitu wilayah homogen, fungsional, dan wilayah perencanaan.

2.2.1 Konsep-Konsep Wilayah

Konsep perwilayahan sering digunakan untuk mengelola dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Konsep perwilayahan ini memerlukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan perbedaan karakteristik secara spasial. Berikut ini beberapa konsep wilayah (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009:32-42),

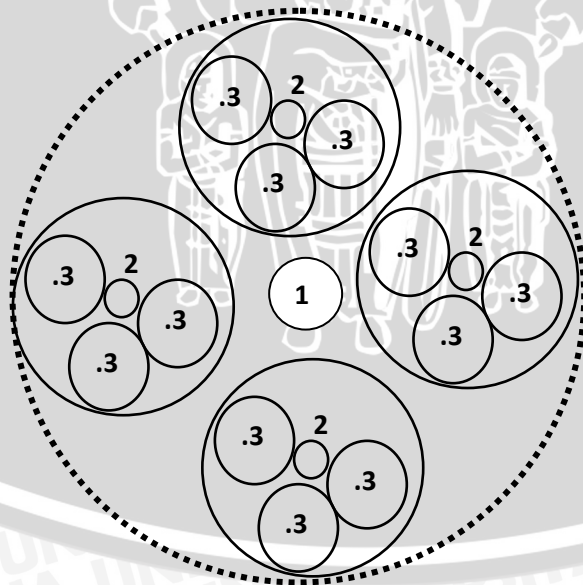
a) Wilayah *Homogen*

Konsep wilayah homogen lebih menekankan pada aspek homogenitas (kesamaan) dalam kelompok dan memaksimumkan perbedaan antarkelompok tanpa

memperhatikan bentuk hubungan fungsional (interaksi) antar wilayah-wilayahnya. Secara umum ada dua faktor penyebab homogenitas yaitu faktor alamiah dan faktor *artificial* (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009). Faktor alamiah yang dimaksud antara lain kemampuan lahan, iklim, dan faktor lainnya. Faktor *artificial* lebih menenankan pada faktor sosial seperti kemiskinan, suku bangsa, budaya, dan lainnya.

b) Wilayah *Nodal*

Konsep wilayah *nodal* lebih berfokus pada peran pengendalian / pengaruh pusat serta hubungan ketergantungan pusat dan elemen-elemen sekelilingnya dibandingkan dengan batas wilayah (Richardson dalam Rustiadi,dkk, 2009:34). Konsep wilayah ini membagi dua wilayahnya menjadi pusat wilayah dan wilayah belakang (*hinterland*) (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009). Pusat wilayah berfungsi sebagai tempat terkonsentrasinya penduduk, pusat pelayanan terhadap daerah *hinterland*, pasar bagi komoditas pertanian dan industri, serta lokasi pemusatan industri manufaktur untuk menghasilkan output tertentu. Sedangkan *hinterland* berfungsi sebagai pemasok bahan baku, pemasok tenaga kerja, daerah pemasaran barang dan jasa industri manufaktur, serta penjaga keseimbangan ekologis.



Gambar 2. 3 Sub-sub wilayah inti dengan berbagai tingkat hierarki pada suatu wilayah nodal (Keterangan 1, 2, 3 menunjukkan tingkatan hierarki pusat)
Sumber: (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009)

c) Wilayah Pesisir

Definisi wilayah pesisir menurut UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Wilayah pesisir dapat ditandai dengan empat ciri (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009), yaitu

- 1) Merupakan wilayah pencampuran atau pertemuan antara darat, laut, dan udara;
- 2) Wilayah pesisir dapat berfungsi sebagai zona penyangga dan merupakan habitat bagi berbagai jenis biota;
- 3) Wilayah pesisir mempunyai perubahan sifat ekologi yang tinggi; dan
- 4) Memiliki tingkat kesuburan yang tinggi dan memiliki sumber zat organik.

d) Wilayah Perencanaan / Pengelolaan Khusus

Wilayah perencanaan dapat menembus beberapa wilayah administrasi berdasarkan kebutuhan dari perencanaan tersebut sehingga batas-batasnya disesuaikan dengan wilayah perencanaannya untuk tujuan khusus (Tarigan, 2005). Sebagai contoh adalah perencanaan Kawasan DAS. Dalam perencanaan kawasan DAS, tidak memandang batas administratif tetapi lebih mempertimbangkan kesatuan siklus hidrorologis.

e) Wilayah Administratif-Politis

Konsep ini didasarkan bahwa suatu wilayah berada dalam satu kesatuan politis yang dipimpin oleh sistem birokrasi atau sistem kelembagaan dengan otonomi khusus (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009).

2.2.2 Kawasan Perkotaan

Definisi kota berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang RTRW adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa kota memiliki karakteristik yang heterogen dan kompleks. Intensitas penggunaan tanah yang tinggi ini menyebabkan kota menjadi pusat aktivitas bagi daerah di sekitarnya (Sadyohutomo, 2008).

Menurut Sadyohutomo (2008:3), kota dapat berarti dua hal. Pertama kota, dalam arti umum yaitu daerah terbangun yang didominasi jenis penggunaan tanah nonpertanian dengan jumlah penduduk dan intensitas penggunaan ruang yang cukup

tinggi. Kedua, kota dalam arti administrasi pemerintahan yaitu bentuk pemerintahan daerah yang mayoritas wilayahnya merupakan daerah perkotaan.

Suatu daerah dapat dikatakan sebagai kota didasarkan pada jumlah fasilitas perkotaan yang tersedia dan kemampuan daerah tersebut dalam menjalankan fungsi perkotaan (Tarigan, 2005). Fasilitas perkotaan yang dimaksud adalah

- a) Pusat perdagangan, terkait dengan luasan skala pelayanannya;
- b) Pusat pelayanan jasa;
- c) Tersedianya prasarana perkotaan seperti jaringan jalan, listrik, telepon, air minum, drainase, pelayanan sampah, taman kota, dan pasar;
- d) Pusat penyediaan fasilitas sosial seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan prasarana olahraga;
- e) Pusat pemerintahan;
- f) Pusat komunikasi dan pangkalan transportasi; dan
- g) Lokasi permukiman yang tertata.

2.2.3 Kawasan Perdesaan

Definisi kota berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang RTRW adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dalam UU tersebut juga dijelaskan bahwa penataan ruang kawasan perdesaan diarahkan untuk,

- a) Pemberdayaan masyarakat perdesaan;
- b) Pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya;
- c) Konservasi sumber daya alam;
- d) Pelestarian warisan budaya lokal;
- e) Pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan; dan
- f) Penjagaan keseimbangan pemabangunan perdesaan-perkotaan.

2.2.4 Hubungan Kawasan Perkotaan dengan Perdesaan

Wilayah perkotaan tidak selalu semuanya berupa daerah terbangun perkotaan (*urban*) tetapi juga masih mempunyai wilayah yang berciri perdesaan (*rural*) (Sadyohutomo, 2008). Wilayah *urban* sering difungsikan sebagai wilayah pusat aktivitas masyarakat sedangkan wilayah *rural* lebih difungsikan sebagai wilayah

penghasil/penyedia kebutuhan masyarakat perkotaan (Tarigan, 2005). Hubungan antara wilayah *urban* dengan *rural* dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2. 1 Hubungan antara wilayah *urban* dengan *rural*

| No. | Sifat Hubungan | Proses Hubungan |
|-----|-----------------------------|---|
| 1 | (+) bagi wilayah sekitarnya | Migrasi desa-kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kota sebagai pasar produk perdesaan ▪ Kota memberikan lapangan kerja bagi penduduk desa |
| | (+) bagi kota | |
| 2 | (-) bagi wilayah sekitarnya | Sistem ekonomi desa-kota <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nilai tukar produk desa lebih rendah daripada produk kota ▪ Surplus dari desa mengalir ke kota |
| | (+) bagi kota | |
| 3 | (+) bagi wilayah sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Migrasi penduduk desa masuk sektor informal kota |
| | (-) bagi kota | |
| 4 | (-) bagi wilayah sekitarnya | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tenaga produktif desa berkurang |
| | (+) bagi kota | |

Sumber: (Sadyohutomo, 2008)

2.3 Pertumbuhan dan Perkembangan Wilayah

2.3.1 Teori Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Pertumbuhan suatu wilayah tidak selalu merata di semua bagian wilayah tersebut tetapi hanya pada beberapa wilayah tertentu saja. Pusat pertumbuhan dapat diartikan secara fungsional dan geografis (Tarigan, 2005). Secara fungsional, pusat pertumbuhan dapat diartikan lokasi konsentrasi kelompok usaha yang memiliki kedinamisan hubungan sehingga mampu untuk memengaruhi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar. Secara geografis, pusat pertumbuhan adalah lokasi yang memiliki kelengkapan fasilitas dan kemudahan sehingga menimbulkan daya tarik untuk berlokasi di tempat tersebut, walaupun tidak ada interaksi antar usaha tersebut. Ciri-ciri pusat pertumbuhan (Tarigan, 2005), yaitu

- a) Adanya hubungan internal dari berbagai macam kegiatan;
- b) Ada *multiplier effect*;
- c) Ada konsentrasi geografis; dan
- d) Bersifat mendorong daerah belakangnya.

2.3.2 Standard Sarana pada Kawasan Permukiman

Standard sarana permukiman yang digunakan sesuai dengan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan. Berikut ini standard SNI untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan perdagangan.

Tabel 2. 2 Sarana Pendidikan

| No | Fasilitas yang Disediakan | Jumlah minimum penghuni yang dilayani (jiwa) | Fungsi | Lokasi | Radius Pencapaian |
|----|----------------------------------|--|---|--|-------------------|
| 1. | Sekolah dasar | 1600 | Menampung pelaksanaan pendidikan sekolah dasar | Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan | 1000 m |
| 2. | Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | 4800 | Menampung pelaksanaan pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama | Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan | 1000 m |
| 3. | Sekolah Lanjutan Tingkat Atas | 4800 | Menampung pelaksanaan pendidikan Sekolah lanjutan tingkat atas | Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan | 3000 m |

Sumber: SNI 03-1733-2004

Tabel 2. 3 Sarana Kesehatan

| No | Fasilitas yang Disediakan | Jumlah minimum penghuni yang dilayani (jiwa) | Fungsi | Letak | Jarak |
|----|---------------------------|--|---|---|--------|
| 1. | Puskesmas | 120000 | sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya | Dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan | 3000 m |
| 2. | Puskesmas Pembantu | 30000 | sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil | Dapat dijangkau dengan kendaraan umum dan dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan | 1500 m |

| No | Fasilitas yang Disediakan | Jumlah minimum penghuni yang dilayani (jiwa) | Fungsi | Letak | Jarak |
|----|---------------------------|--|--|---------------------------------------|--------|
| 3. | BKIA / Klinik Bersalin | 30000 | melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun | Dapat dijangkau dengan Kendaraan umum | 4000 m |

Sumber: SNI 03-1733-2004

Tabel 2. 4 Sarana Perdagangan

| No | Fasilitas yang Disediakan | Jumlah minimum penghuni yang dilayani (jiwa) | Fungsi | Letak | Jarak |
|----|---------------------------|--|---|--|--------|
| 1. | Toko / warung | 250 | menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari | Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain | 300 m |
| 2. | Pertokoan | 6000 | menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang lebih lengkap dan pelayanan jasa seperti wartel, fotocopy, dan sebagainya | Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D | 2000 m |
| 3. | Pasar Lingkungan | 30000 | menjual keperluan sehari-hari termasuk sayur, daging, ikan, buah-buahan, beras, tepung, bahan-bahan pakaian, pakaian, barang-barang kelontong, alat-alat pendidikan, alat-alat rumah tangga, serta pelayanan jasa seperti warnet, wartel dan sebagainya | Dapat dijangkau dengan kendaraan umum | |

Sumber: SNI 03-1733-2004

SNI ini digunakan sebagai pedoman dalam menghitung kapasitas pelayanan sarana pendidikan, kesehatan, dan perdagangan sehingga dapat diketahui kemampuan sarana tersebut dalam melayani wilayah disekitarnya.

2.4 Kesenjangan Wilayah

2.4.1 Teori Kesenjangan Wilayah

Ada beberapa variabel yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan wilayah yaitu variabel fisik dan sosial ekonomi wilayah (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009:238). Dari variabel tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa faktor antara lain

a) Faktor geografi

Pada wilayah yang luas terdapat berbagai macam variasi kualitas dan kuantitas sumberdaya mineral, sumberdaya pertanian, topografi, iklim, curah hujan dan sebagainya. Untuk wilayah yang mempunyai kondisi geografi yang lebih baik, akan berkembang lebih baik juga dibandingkan dengan wilayah lainnya.

b) Faktor sejarah

Perkembangan suatu wilayah tergantung terhadap apa yang telah dilakukan pada masa lalu terutama yang terkait dengan organisasi dan kehidupan perekonomian.

c) Faktor politik

Stabilitas politik dalam suatu wilayah cukup berpengaruh terhadap perkembangan wilayahnya. Kondisi politik yang kurang stabil, dapat mempengaruhi minat investor dalam menanamkan modalnya. Hal ini akan berdampak pada lambatnya perkembangan wilayah tersebut.

d) Faktor kebijakan pemerintah

Kebijakan pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antara pusat wilayah dengan *hinterland*nya kurang maksimal. Kebijakan awal yang berupa *trickle down effect* berubah menjadi *backwash effect* yaitu pengurasan sumberdaya secara berlebihan dari wilayah *hinterland*.

e) Faktor administrasi

Kemudahan administrasi dalam suatu wilayah lebih mudah untuk menarik investor. Hal ini dapat membantu dalam pengembangan wilayah. Untuk wilayah yang kinerja administrasinya dapat mengurangi minat investor.

f) Faktor sosial budaya

Pada wilayah yang masyarakatnya relatif maju umumnya memiliki institusi dan perilaku yang kondusif untuk berkembang sehingga wilayahnya akan lebih cepat berkembang dibandingkan dengan wilayah yang masyarakatnya cenderung konservatif dan menghambat perkembangan ekonomi.

g) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi yang menyebabkan kesenjangan wilayah dapat diklasifikasikan sebagai berikut,

1. Faktor ekonomi yang terkait dengan perbedaan kualitas dan kuantitas dari faktor produksi yang dimiliki;
2. Faktor ekonomi yang terkait akumulasi dari berbagai faktor seperti dalam lingkaran setan kemiskinan;

3. Faktor ekonomi yang terkait dengan pasar bebas dan pengaruhnya pada *spread effect* dan *backwash effect*; dan
4. Faktor ekonomi yang terkait dengan distorsi pasar seperti immobilitas, kebijakan harga, keterbatasan spesialisasi, keterbatasan keterampilan tenaga kerja, dan sebagainya.

2.4.2 Indeks Williamson

Indeks Williamson sering digunakan sebagai alat untuk mengetahui disparitas antar wilayah. Perhitungan indeks Williamson lebih melihat pada kesenjangan ekonomi yang berupa besaran PDRB antar wilayah. Kriteria pengukurannya adalah semakin besar nilai indeks antarwilayah, semakin besar pula tingkat perbedaan ekonomi dari masing-masing wilayah dengan reratanya; sebaliknya semakin kecil nilai ini menunjukkan pemerataan wilayah yang baik (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009:197). Indeks Williamson diformulasikan sebagai berikut

$$V_w = \frac{\sqrt{\frac{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

keterangan:

- v_w = Indeks Williamson
- f_i = Jumlah Penduduk di wilayah ke-i
- n = Jumlah Penduduk Kota
- y_i = PDRB wilayah ke-i
- \bar{y} = PDRB Kota

Perhitungan indeks Williamson akan menghasilkan nilai yang lebih besar atau sama dengan nol. Jika nilai indeks yang dihasilkan adalah nol, artinya tidak ada kesenjangan ekonomi antar daerah. Sedangkan bila nilai indeks lebih besar dari nol, menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi antar wilayah.

Menurut Ayu Savitri Gama dalam Jurnal Ekonomi dan Sosial Volume 2 Nomor 1 (2008:40) nilai dari hasil perhitungan indeks williamson berkisar antara 0 sampai 1. Dalam modul ekonomi regional (Emilia & Imelia, 2006:51) rentang nilai indeks Williamson diklasifikasikan sebagai berikut,

- a) Bila nilai $V_w < 0,3$ artinya kesenjangan ekonomi wilayah rendah;
- b) Bila nilai V_w antara $0,3 - 0,4$ artinya kesenjangan ekonomi wilayah sedang; dan
- c) Bila nilai $V_w > 0,4$ artinya kesenjangan ekonomi wilayah tinggi.

2.4.3 Pengembangan Wilayah

Menurut Muta'ali (2011:24-25) pengembangan wilayah bertujuan untuk mengurangi *disparitas* (ketimpangan) perkembangan fisik dan sosial ekonomi, tidak hanya antar wilayah melainkan juga ketimpangan di dalam wilayah itu sendiri. Hal kedua, pengembangan wilayah diperlukan dalam proses pertumbuhan wilayah dikarenakan empat faktor, antara lain

- 1) perlu rencana kebijakan sosial-ekonomi;
- 2) perlu menemukenali pertumbuhan ekonomi dan karakteristik penduduk, relevansinya untuk penentuan pembangunan fasilitas sosial;
- 3) penentuan arahan perkembangan jangka panjang (20-25 tahun); dan
- 4) peningkatan kerjasama bantuan ekonomi.

Tipe proses pengembangan wilayah dapat dibedakan menurut visi tertentu, seperti

- 1) kanjian kondisi alam dan geografi untuk mengetahui kelayakan lahan bagi pengembangan fisik;
- 2) mengetahui distribusi dan struktur penduduk, tingkat perkembangan, dan struktur serta kepemilikan lahan;
- 3) penentuan lokasi untuk fasilitas umum dan kompatibilitas guna lahan;
- 4) menyokong konsep rencana; dan
- 5) merupakan rencana itu sendiri yang meliputi penetapan fungsi wilayah, program-program, pembangunan perumahan *zoning*.

Dalam buku Teknik Analisis Regional (2000:13), pengembangan wilayah dapat diketahui dengan cara melakukan perhitungan indeks tingkat perkembangan wilayah. Tahapan indeks perkembangan wilayah sebagai berikut

- a) Menentukan indikator perkembangan.

Prinsip utama dalam menentukan indikator perkembangan wilayah (1) tergantung pada sumber data yang tersedia atau yang digunakan; (2) semakin banyak dan variatif indikator dan variabel yang digunakan semakin baik dan akurat; (3) tidak terjadi perhitungan ganda (*double counting*) terhadap variabel yang digunakan.

- b) Memberi nilai sebagai penentuan indeks komposit dengan cara

$Scalling = (R - R_j) / (R_b - R_j) \times 100\%$, rentang nilai antara 0 sampai 100

R : data mentah dari pengamatan yang diskalakan

R_b: nilai yang tertinggi dari keseluruhan data

R_j : nilai yang terendah dari keseluruhan data

- c) Pemberian bobot untuk setiap indikator sesuai dengan kontribusinya. Besar bobot ditentukan dengan cara mengalikan nilai indikator dengan hasil *scalling*.
- d) Menghitung indeks perkembangan wilayah.
Nilai bobot setiap indikator dijumlahkan dan hasilnya merupakan indeks komposit tingkat perkembangan wilayah.
- e) Interpretasi hasil perhitungan tersebut berupa tingkat perkembangan wilayah tinggi sampai rendah.

2.5 Penataan Ruang

2.5.1 Struktur Ruang

Definisi Struktur ruang berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Struktur ruang dari daerah secara teoritik dapat dibagi menjadi tiga unsur pokok, Sitohang dalam Rezeki yaitu :

- a) Kelompok lokasi industri jasa atau tersier, termasuk pelayanan administrasi, keuangan, perdagangan eceran dan besar dan pelayanan jasa-jasa lainnya yang cenderung mengelompok menjadi sistem tempat sentral yang tersebar secara seragam pada hamparan daerah yang mempunyai hubungan yang mudah dengan pasar-pasar terbesar.
- b) Lokasi-lokasi yang memencar dengan spesialisasi industri seperti manufaktur, pertambangan dan rekreasi, yang cenderung untuk mengelompok menjadi *cluster* atau aglomerasi menurut lokalisasi sumberdaya fisik seperti batubara dan sifat-sifat fisik seperti lembah sungai dan pantai.
- c) Pola jaringan pengangkutan, seperti jalan raya dan kereta api, yang dapat menimbulkan pola pemukiman yang linear

2.5.2 Tata Ruang

Berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, mendefinisikan ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.

Tarigan, (2005:49) mendefinisikan ruang wilayah sebagai lapisan atas di permukaan bumi yang berfungsi untuk menopang aktivitas manusia dan makhluk lainnya baik secara memodifikasi maupun menikmati secara langsung.

Sedangkan tata ruang berdasarkan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. Pola ruang yang dimaksud adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

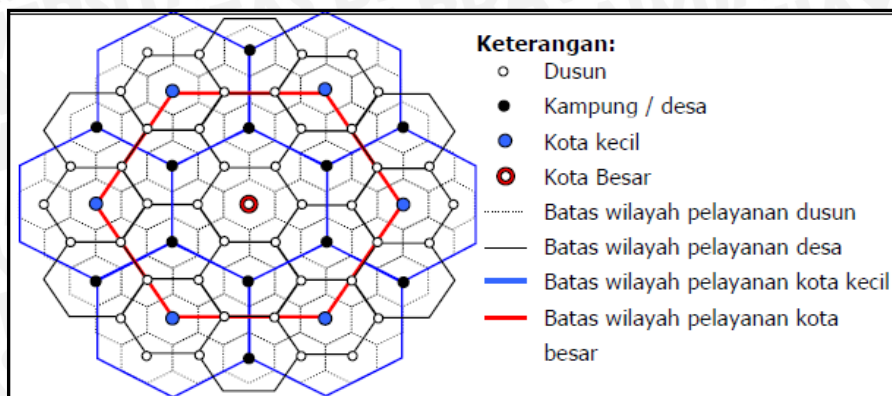
2.5.3 Teori Lokasi

Teori lokasi pusat diperkenalkan oleh Walter Christaller pada tahun 1933 dalam bukunya yang berjudul *Central Places in Southern Germany* dan menjelaskan tentang susunan besaran kota, jumlah kota, serta distribusinya dalam suatu wilayah. Lokasi pusat merupakan tempat berkumpulnya para produsen untuk menyediakan barang dan jasa bagi populasi di sekitarnya. Lokasi pusat tertata dalam suatu pola vertikal maupun horizontal (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009:87).

Christaller berpendapat bahwa lokasi pusat membentuk hierarki yang teratur dan mencerminkan hubungan yang tetap antar setiap level dalam hierarki tersebut. Maksudnya bahwa setiap pusat mendominasi pusat lain yang memiliki orde lebih rendah dalam wilayahnya.

Christaller mengembangkan modelnya untuk suatu wilayah abstrak dengan ciri-ciri berikut (Tarigan, 2005:79)

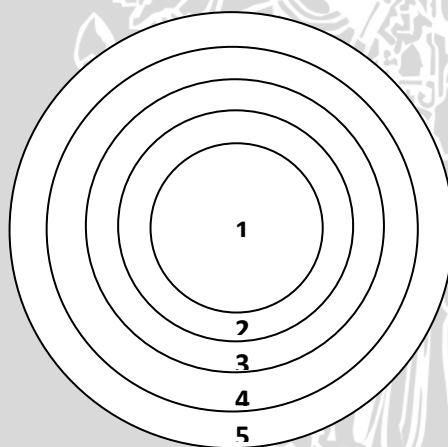
- a) Wilayahnya adalah dataran tanpa romaan, semua adalah datar dan sama;
- b) Gerakan dapat dilaksanakan ke segala arah (*isotropic surface*);
- c) Penduduk memiliki daya beli yang sama dan tersebar secara merata pada seluruh wilayah; dan
- d) Konsumen bertindak rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak/biaya.



Gambar 2. 4 Hierarki tata ruang pusat-pusat menurut Christaller untuk K=3
Sumber: (Tarigan, 2005)

Sistem lokasi pusat ditentukan secara bertahap sesuai dengan dua prinsip dasar (Rustiadi, Saefulhakim, & Panuju, 2009:88). Pertama, semua wilayah mendapatkan *supply* barang dari pusat-pusat tertentu. Kedua, lokasi pusat dengan *range* tertentu menyediakan barang dan jasa sesuai *range* dan dari orde yang lebih rendah.

Teori lokasi lain diperkenalkan oleh E.W. Burgess adalah model zone konsentris yaitu sebagai berikut



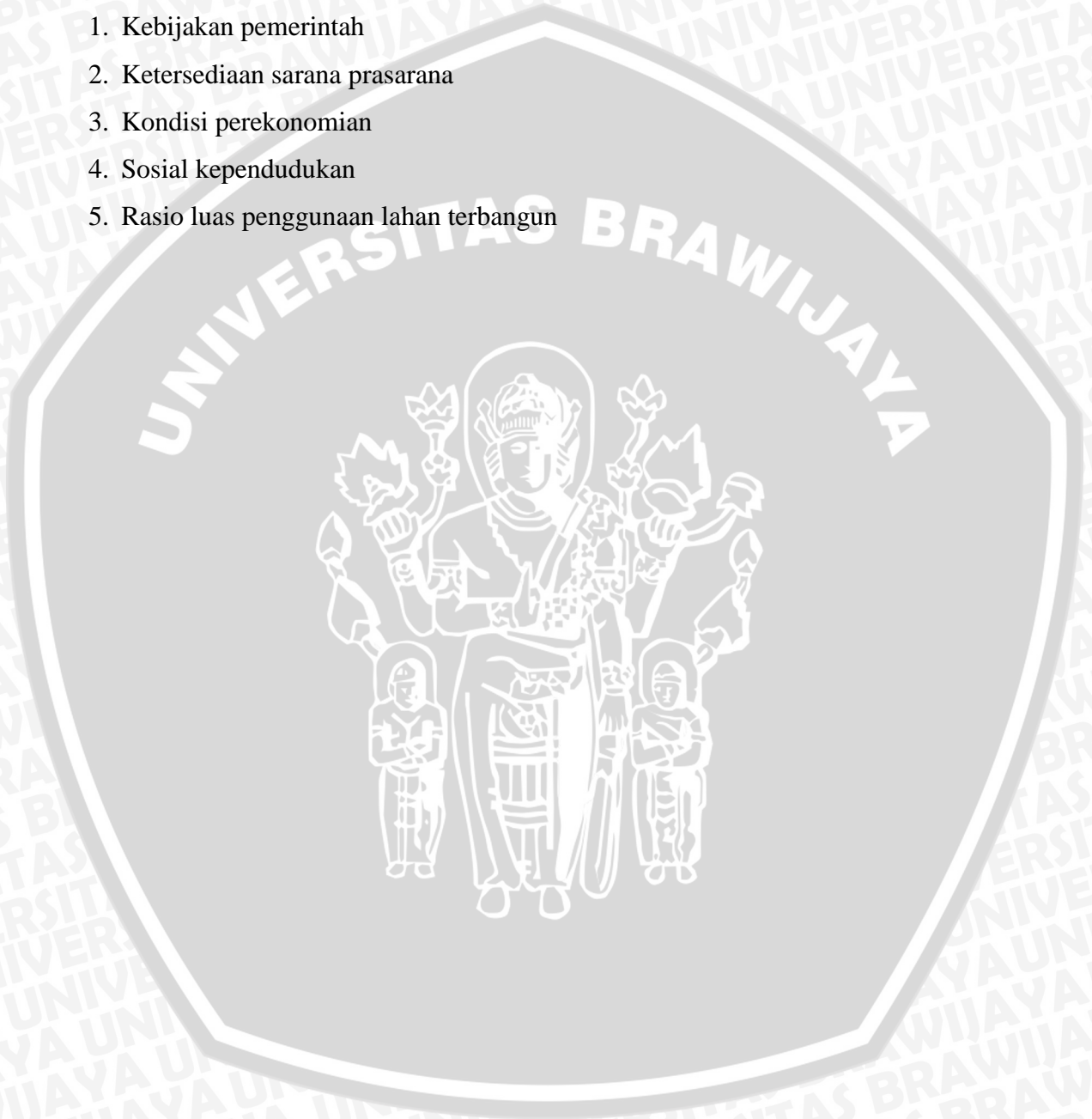
Gambar 2. 5 Model Zone Konsentris (Burgess)
Sumber: (Yunus, 2000:5)

1. Daerah Pusat Kegiatan (*Central Business District*)
2. Zona peralihan (*transition zone*)
3. Zona perumahan para pekerja (*zone of working men's homes*)
4. Zona permukiman yang lebih baik (*zone of better residences*)
5. Zona para penglaju (*zona of commuters*)

2.6 Penelitian Terdahulu

Subbab ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian yang pernah dilakukan terkait dengan studi kesenjangan wilayah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang ada di Tabel 2.5, studi ini mengambil variabel yang sama dengan kedua penelitian sebelumnya, yaitu

1. Kebijakan pemerintah
2. Ketersediaan sarana prasarana
3. Kondisi perekonomian
4. Sosial kependudukan
5. Rasio luas penggunaan lahan terbangun



Tabel 2. 5 Studi Terdahulu Terkait Kesenjangan Wilayah

| No | Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Tujuan | Metodologi Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|---|-------|--|---|---|--|---|--|
| 1. | Rina Rezeki, Universitas Diponegoro Semarang | 2007 | Disparitas Sub Wilayah (Kasus Perkembangan Antar Kecamatan di Kabupaten Tanah Datar); Tesis | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya disparitas 2. Menemukenali dan menganalisis karakteristik wilayah studi (fisik, sosial, ekonomi) serta mengkaji permasalahan disparitas di Kabupaten Tanah Datar 3. Menentukan faktor-faktor utama yang mempengaruhi terhadap terjadinya disparitas di Kabupaten Tanah Datar 4. Menganalisis kebijaksanaan pembangunan di Kabupaten Tanah Datar dan interaksi ruang serta mengkaji konsep disparitas 5. Menemukenali konsep disparitas | <p>Metode kualitatif dengan dengan mendeskripsikan kondisi wilayah studi; Metode kuantitatif dengan menggunakan analisis faktor, LQ, dan Tipologi daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pemerintah 2. Ketersediaan sarana prasarana 3. Kondisi perekonomian 4. Sosial kependudukan | <p>Kabupaten Tanah Datar kurang mampu dalam memberikan pelayanan yang lebih baik dibanding <i>hinterland</i>, sehingga masyarakat pergi ke daerah lain.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Metode penelitian |
| 2 | Ayu Candra Kurniati, Universitas Brawijaya | 2010 | Kajian Disparitas sebagai Solusi dalam Penentuan Pemilihan Kecamatan Baru Kota Pasuruan; Skripsi | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui karakteristik dan kesenjangan tingkat perkembangan Kota Pasuruan 2. Menentukan kecamatan baru dari berbagai alternatif kecamatan berdasarkan kajian disparitas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Tingkat perkembangan (Metode indeks, Metode skalogram, Metode kurva kumulatif) 2. Analisis ketersediaan sarana (metode indeks sentralitas) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepadatan penduduk 2. Rasio jumlah penduduk menurut pekerjaan 3. Rasio luas penggunaan lahan terbangun | <p>Tingkat perkembangan Kota Pasuruan antara rendah sampai tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya ketidakmerataan pembangunan di Kota Pasuruan.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi penelitian 2. Metode penelitian |

| No | Peneliti | Tahun | Judul Penelitian | Tujuan | Metodologi Penelitian | Variabel | Hasil Penelitian | Perbedaan |
|----|----------|-------|------------------|--------|-----------------------|--|------------------|-----------|
| | | | | | 3. Analisis gravitasi | 4. Jumlah dan jenis sarana 5. Jarak antar masing-masing kelurahan | | |



